

ARTICLE INFORMATION

Received November 27th 2021

Accepted January 20th 2022

Published January 22nd 2022

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan

Fice Handayani¹, Dina Mustika Sari², Adea Yuniarti³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan

email: ficehandayani80@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan. Faktor-faktor yang diteliti antara lain sistem pengendalian intern, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan kompetensi sumber daya manusia. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan. Jumlah kuesioner yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 51 responden yang dikumpulkan dari 18 lokasi penelitian berupa dinas-dinas daerah yang berada di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Balikpapan. Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif, regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Kata kunci: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Sistem Pengendalian Intern; Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); Kompetensi Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the quality of information on the financial statements of the government of Balikpapan City. Factors studied include internal control systems, application Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) and human resource competencies. The population in this study is Organisasi Perangkat Daerah (OPD) of Balikpapan City. The number of questionnaires processed in this study were 51 respondents collected from 18 research locations in Dinas Daerah within the scope of Organisasi Perangkat Daerah (OPD) of Balikpapan City. Research methods in this study are descriptive statistical analysis, multiple linear regressions, classical assumption test. The results of testing the hypothesis in this study indicate that internal control systems, application Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) and human resource competencies partially positive affect the quality of information on the financial statements of the government of Balikpapan City.

Keywords: *Quality of Information on The Financial Statements of The Government; Internal Control Systems; Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); Human Resources Competencies*

PENDAHULUAN

Sejak reformasi tahun 1998 akuntansi sektor publik mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, dimana tujuan penting dari reformasi akuntansi publik tidak lain dan tidak bukan adalah untuk tercapainya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian dengan terciptanya akuntabilitas diharapkan aparatur sektor publik dapat menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pusat maupun daerah sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat serta tepat sasaran.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan adanya otonomi daerah yang bertujuan agar tercipta kemandirian daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tak terkecuali dalam hal laporan keuangan.

Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Walikota satu kali dalam setahun. Dalam penyampaiannya, laporan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD merupakan cermin bagi kualitas laporan pengelolaan dan penyajian LKPD masing-masing daerah. Informasi yang terdapat di dalam LKPD harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai serta memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yakni, 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat Dibandingkan, 4) Dapat Dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam LKPD memenuhi kriteria tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, jika tidak memenuhi maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kelemahan administrasi, ketidakehematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang pada akhirnya akan berdampak kepada masyarakat.

Balikpapan merupakan kota yang sedang berkembang dan menjadi gerbang Kalimantan Timur. Seperti yang kita ketahui, banyak prestasi dan predikat yang dicapai oleh Kota Balikpapan, diantaranya yaitu sebagai kota yang menerima penghargaan Adipura Kencana selama lima tahun berturut-turut. Kota Balikpapan juga dinobatkan sebagai Kota Paling Dicintai di Dunia pada tahun 2015 dan Kota Layak Huni di Indonesia pada tahun 2018. Oleh sebab itu, dalam hal kualitas laporan keuangan Kota Balikpapan harus dapat menjadi panutan bagi kota-kota berkembang lainnya.

Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. SIPKD dapat membantu dalam proses pencatatan serta pelaporan anggaran dan keuangan, membantu proses identifikasi, pengukuran juga pelaporan transaksi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan dan hal-hal lain yang dianggap penting dalam penyajian laporan keuangan daerah. Penggunaan teknologi informasi sebagai penunjang SIPKD juga mempunyai peran penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta dapat diterima secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya. Dengan diterapkannya SIPKD, tentunya satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah sumber daya manusia sebagai pemakai SIPKD itu sendiri. Semua itu tidak akan terwujud apabila sumber daya manusia sebagai pemakai dan penggerak dalam pelaksanaannya tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam penerapan SIPKD secara langsung, karena pengimputan data dilakukan oleh SDM, tentunya SDM yang dipilih pun harus memiliki dasar akuntansi yang baik.

Penggunaan SIPKD memang membuat proses pembuatan laporan keuangan menjadi praktis dan mengurangi risiko kesalahan perhitungan, tetapi karena merupakan sistem komputerisasi jelas satu kesatuan dalam SIPKD saling terhubung, sehingga jika terjadi satu kesalahan dalam penginputan data, baik akun maupun nominal, akan mempengaruhi segala hal dalam SIPKD yang akhirnya juga mempengaruhi laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah banyak dilakukan namun hasil dari penelitian tersebut bereda-beda. Lamuda dan Syamsiah (2018) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sedangkan Aminah *et al* (2019) hasil penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi LKPD. Sugiarto (2014) yang dalam penelitiannya menghasilkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi LKPD, sedangkan Efendi *et al* (2017), menyatakan bahwa SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi LKPD. Karena adanya perbedaan hasil penelitian dari peneliti terdahulu ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali supaya mendapatkan hasil yang lebih baik

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sistem pengendalian intern, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota Balikpapan.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan sebagai salah satu lingkup dari akuntansi publik dimana akuntansi pemerintahan merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengomunikasikan atau melaporkan transaksi ekonomi dari entitas pemerintahan kota maupun daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berguna sebagai acuan untuk mengambil keputusan ekonomi oleh pihak intern, maupun ekstern yang terkait di pemerintahan.

Perkembangan akuntansi pada pemerintah di Indonesia sebenarnya telah diterapkan sekitar tahun 1979-1800. Namun pada saat itu pencatatan akuntansi dilakukan dengan sistem pencatatan single entry atau pencatatan berbasis kas, dimana transaksi ekonomi dicatat satu kali sesuai dengan pengeluaran atau penerimaan kas. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak memiliki catatan mengenai hutang dan piutang maupun aset tetap. Sehingga pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara baik pusat maupun daerah, yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah meliputi Laporan Realiasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dimana laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tujuan Akuntansi Pemerintah

Tujuan akuntansi pemerintahan menurut Halim (2010:39) bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 1) Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*) bertujuan memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit di pemerintahan. Lebih lanjut tujuan pertanggungjawaban ini mewajibkan setiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan; 2) Manajerial (*management*), yang berarti akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan

keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah; 3) Pengawasan (*controlling*), tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua

Menurut Siregar (2015:72) "Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)". Tanjung (2013:8) menyatakan "Kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan". Oleh karena posisi kerangka konseptual ini sebagai konsep, baik untuk penetapan standar akuntansi maupun praktek akuntansi maka setidaknya-tidaknya harus merumuskan (1) tujuan akuntansi secara jelas, (2) karakteristik-karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang bermanfaat dan (3) konsep-konsep mendasar dalam akuntansi.

Kerangka konseptual juga berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dengan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual.

Laporan Keuangan Pemerintahan

Bastian (2010:297) menjelaskan, "Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik". Sari dan Fadli (2017) mendefinisikan Laporan Keuangan Daerah sebagai "Informasi yang memuat data berbagai elemen struktur finansial yaitu pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut dan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan".

PP No. 71 Tahun 2010 "Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan". Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pokok dalam pemerintahan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sistem Pengendalian Intern

Menurut Aminah *et al.* (2019), "Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*)". Dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa "Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan". Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut PP No. 60 Tahun 2008 merupakan "Sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah".

Adapun unsur SPIP yang tercantum dalam PP No. 60 Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian yang merupakan unsur pertama, yang didefinisikan sebagai kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP wajib dipelihara melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi

yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan pemerintah terkait.

Unsur Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kedua yang tercantum dalam PP No. 60 Tahun 2008 yakni penilaian resiko, yang merupakan kegiatan penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas dua hal, yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko.

Unsur Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ketiga yang tercantum dalam PP No. 60 Tahun 2008 adalah kegiatan pengendalian, yakni tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Adapun kegiatan pengendalian dalam SPIP terdiri dari : a. Review atas kinerja instansi pemerintah, b. Pembinaan sumber daya manusia, c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, d. Pengendalian fisik atas asset, e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja, f. Pemisahan fungsi, g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Unsur Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Unsur ini wajib diselenggarakan secara efektif di lingkungan pemerintahan. Pemerintah wajib menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal, dan unsur yang terakhir adalah pemantauan pengendalian intern, yakni proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

PP No. 56 Tahun 2005 menjelaskan bahwa "Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah". Pengelolaan keuangan daerah dewasa ini telah berkembang dengan pesat, dimana telah berupa aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dan diolah oleh Subdit Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Harlinda, 2017, menjelaskan, "Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi". Lamuda dan Syamsiah (2018) menjelaskan bahwa "Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan." Herman dan Daswir, 2017 menjelaskan, "Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai."

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Sistem pengendalian intern adalah prosedur - prosedur yang dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan entitas yang berdasar pada peraturan –peraturan tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Laoli (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi LPKD. Lamuda & Syamsiah (2018) yang hasil penelitiannya juga menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapatlah ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Sari dan Fadli, 2017, “Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar, maka pemanfaatan sistem informasi akuntansi akan sangat membantu untuk mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi”. Penelitian yang dilakukan oleh effendi et al (2017) menunjukkan adanya pengaruh yang positif SIPKD terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sehingga berdasarkan penjelasan diatas dapatlah di tarik suatu hipotesis:

H₂: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

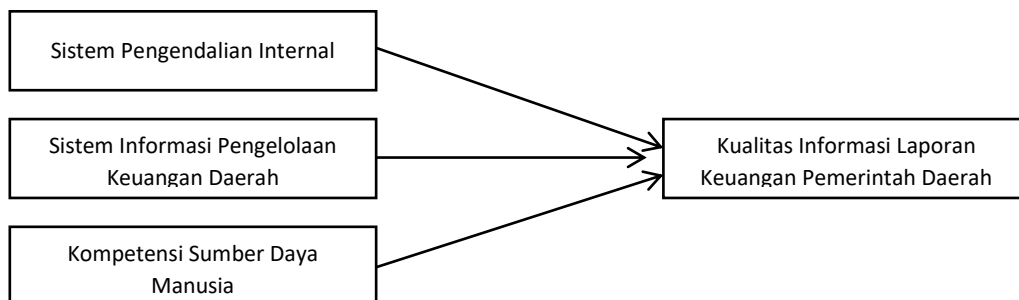
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Lamuda dan Syamsiah (2018) “Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberi kontribusi optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi”. Dimana hasil penelitian nya menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi SDM dengan kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Herman dan Daswir, 2017, menjelaskan bahwa “Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.” Dari penjelasan tersebut, maka dapatlah ditarik hipotesis:

H₃: Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dari kajian literatur dan hipotesis yang dikemukakan diatas maka dapatlah dibuat kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Untuk Variabel bebas (variabel X) Sistem Pengendalian Intern diukur dengan indikator yaitu Standart Operating Procedure (SOP), pemisahan wewenang, dokumen dan catatan yang memadai, tindakan disiplin atas pelanggaran serta pembatasan akses di Pemerintah Kota Balikpapan, mengacu pada penelitian Surastiani & Handayani (2015). Kuesioner mencakup 5 item pertanyaan dengan skala *likert*.

Untuk variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diukur dengan indikator yakni sistem akuntansi yang sesuai dengan SAP, laporan keuangan yang terkomputerisasi, jaringan internet tersedia, dan terdapat antivirus yang memadai di Pemerintah Kota Balikpapan, mengacu pada penelitian Murapi (2016). Kuesioner mencakup 5 item pertanyaan dengan skala *likert*. Variabel kompetensi SDM juga memakai skala *likert* dan lima item pertanyaan serta dengan indikator pemahaman tentang akuntansi, SDM yang berkualitas, sumber daya yang memadai, peran dan tanggung jawab, pelatihan keahlian dalam tugas, sosialisasi peraturan baru dan pemahaman tentang struktur organisasi karyawan Pemerintah Kota Balikpapan, mengacu pada penelitian Surastiani & Handayani (2015).

Untuk variabel terikat (variabel Y) yakni kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota Balikpapan diukur dengan indikator aktivitas keuangan di masa lalu, ketepatanwaktuan penyajian, pengambilan keputusan, disajikan wajar dan jujur, informasi dapat dibandingkan, informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami dan sesuai SAP mengacu pada penelitian Murapi (2016). Kuesioner mencakup 5 *item* pertanyaan dengan skala *likert*.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Daftar
Sistem Pengendalian Intern	Kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> 2. Pemisahan wewenang 3. Dokumen dan catatan yang memadai 4. Tindakan disiplin atas pelanggaran 5. Pembatasan akses (Surastiani & Handayani, 2015)	5 item pertanyaan dengan skala <i>likert</i>
Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	SIPKD merupakan aplikasi pengembangan dan pemanfaatan dari kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan serta penyaluran informasi keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. sistem akuntansi yang sesuai dengan SAP 2. Laporan keuangan yang terkomputerisasi 3. Jaringan internet tersedia 4. Terdapat antivirus yang memadai (Murapi, 2016)	5 item pertanyaan dengan skala <i>likert</i>
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kemampuan seseorang untuk dapat menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang akuntansi 2. SDM yang berkualitas 3. Sumber daya yang memadai 4. Peran dan tanggung jawab 5. Pelatihan keahlian dalam tugas 6. Sosialisasi peraturan baru 7. Pemahaman tentang struktur organisasi (Surastiani & Handayani, 2015)	5 item pertanyaan dengan skala <i>likert</i>
Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah Daerah dapat mengukur sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan proses mereka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas keuangan di masa lalu 2. Ketepatanwaktuan penyajian 3. Pengambilan keputusan 4. Disajikan wajar dan jujur 5. Informasi dapat dibandingkan 6. Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami 7. Sesuai SAP (Murapi, 2016)	5 item pertanyaan dengan skala <i>likert</i>

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan. Jumlah OPD di Kota Balikpapan adalah sebanyak 71 OPD yang terdiri dari 3 Sekretariat, 18 Dinas, 10 Badan dan Kantor, 6 Kecamatan dan 34 Kelurahan. Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling menurut Jogiyanto (2018:98) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu, yakni : sampel penelitian berupa pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan OPD Kota Balikpapan, dengan 3 orang responden di setiap OPD, sampel merupakan OPD yang dianggap memiliki peran utama dalam pelaksanaan kegiatan otonomi daerah, responden memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan LKPD dan atau tata usaha keuangan.

Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan diatas, maka didapatkan sampel OPD yaitu sebanyak 18 Dinas di Kota Balikpapan dengan 3 orang responden per dinas sehingga total semuanya 54 responden . Dan setelah dilakukan pembagian kuisisioner ternyata responden yang mengembalikan kuisisioner berjumlah 51 orang. Pembatasan obyek penelitian pada dinas daerah dilakukan dengan alasan bahwa dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Lokasi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di 18 Dinas Kota Balikpapan dengan membagikan kuesioner kepada pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuisisioner, wawancara dan studi pustaka.

Metode Analisis Data

Untuk analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda, melakukan uji reliabilitas dan validitas, uji-t untuk uji hipotesis dan melakukan pengujian asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Variabel Penelitian

Berikut ini disajikan hasil statistik deskriptif dari variabel Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Informasi LKPD.

Tabel. 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std.Deviation
Sistem Pengendalian Intern	51	19	25	21.86	3.601
SIPKD	51	18	25	22.16	5.215
Kompetensi SDM	51	16	25	20.75	4.234
Kualitas Informasi LKPD	51	18	25	21.59	5.487

Sumber: data primer diolah (2021)

Dengan nilai rata-rata 21.86, maka dapat dinyatakan bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik untuk pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi LKPD di Kota Balikpapan. Untuk SIPKD dengan nilai rata-rata 22.16, maka dapat dinyatakan bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik untuk pengaruh SIPKD terhadap kualitas informasi LKPD di Kota Balikpapan. Dengan nilai rata-rata 20.75, maka dapat dinyatakan bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik untuk pengaruh Kompetensi SDM terhadap kualitas informasi LKPD di Kota Balikpapan. Dengan nilai rata-rata 21.59, maka dapat dinyatakan bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap kualitas informasi LKPD di Kota Balikpapan.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan bantuan program SPSS 26. Data dinyatakan valid jika r hitung yang merupakan nilai item dari *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%). Adapun nilai r tabel diperoleh dengan rumus $DF = N - 2$, sehingga untuk penelitian ini $DF = 51 - 2$ yaitu 49. Dengan bantuan tabel F maka didapat nilai r tabel 0,276. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item masing-masing instrumen pernyataan valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* $>$ r tabel (0,276) pada signifikansi 0,05 (5%). Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden stabil dari waktu ke waktu. Kriteria suatu instrumen penelitian jika dilihat dengan uji statistik *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern	0,809	0,60	Reliabel
SIPKD	0,868	0,60	Reliabel
Kompetensi SDM	0,662	0,60	Reliabel
Kualitas Informasi LKPD	0,900	0,60	Reliabel

Sumber: data primer diolah (2021)

Tabel. 3, di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Sistem Pengendalian Intern, SIPKD, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Informasi LKPD dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini juga telah melalui uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan uji autokorelasi, yang mana hasilnya tidak ada masalah dalam uji asumsi klasik tersebut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat. Adapun hasil pengujianya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.4 Regresi Linear Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.502	2.399		-0.626	0.534
Sistem Pengendalian Intern (X1)	0.364	0.164	0.295	2.222	0.031
SIPKD (X2)	0.327	0.114	0.319	2.878	0.006
Kompetensi SDM (X3)	0.380	0.134	0.334	2.831	0.007

Sumber : data primer diolah (2021)

Berdasarkan hasil pada tabel 3. diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,502 + 0,364X_1 + 0,327X_2 + 0,380X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Kualitas Informasi LKPD
- X1 : Sistem Pengendalian Intern
- X2 : SIPKD
- X3 : Kompetensi SDM
- e : *Error*

Nilai konstanta sebesar -1,502 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (sistem pengendalian intern, SIPKD dan kompetensi SDM) adalah nol maka kualitas informasi LKPD akan terjadi sebesar -1,502.

Koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern (X1) sebesar 0,364 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel sistem pengendalian intern akan meningkatkan kualitas informasi LKPD sebesar 0,364.

Koefisien regresi variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (X2) sebesar 0,327 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel SIPKD akan meningkatkan kualitas informasi LKPD sebesar 0,327.

Koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,380 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas informasi LKPD sebesar 0,380.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel. 3 diketahui bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi LKPD Kota Balikpapan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,222 > 2,0117$) dan tingkat signifikansi $0.031 < 0.05$. sehingga hipotesis pertama diterima. Dan hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Laoli (2018) serta penelitian Lamuda dan Syamsiah (2018) yang menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Indikator sistem pengendalian intern seperti adanya SOP, pemisahan wewenang, pemeriksaan catatan akuntansi, tindakan disiplin serta pembatasan akses telah diterapkan di semua dinas di Kota Balikpapan. Di semua dinas telah memiliki SOP, serta susunan organisasi yang jelas. Khusus untuk pembatasan akses pada bagian keuangan, salah satu cara yang diterapkan adalah dengan terbatasnya akses dalam memperbaiki jurnal akuntansi ketika pegawai melakukan kesalahan input. Bagian keuangan dinas tidak dapat melakukan perubahan ataupun memperbaiki apa yang telah di input, maka untuk memperbaikinya adalah dengan mengajukan surat resmi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan yang memiliki wewenang untuk memperbaikinya. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian intern yang baik dalam proses pembuatan laporan keuangan daerah, serta meminimalisir adanya manipulasi sekaligus dapat melihat dan menilai kinerja pegawai di bagian akuntansi.

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel.3 diketahui bahwa SIPKD berpengaruh positif terhadap kualitas informasi LKPD Kota Balikpapan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,878 > 2,0117$) dan tingkat signifikansi $0.006 < 0.05$ dan merupakan yang paling dominan diantara variabel lainnya, sehingga hipotesis kedua diterima. Dan hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh effendi et al (2017) menunjukkan adanya pengaruh yang positif SIPKD terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Adapun indikator utama dalam variabel ini yaitu sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan secara komputerisasi, dan ditunjang oleh jaringan internet dan antivirus yang memadai. Hal ini sudah diterapkan oleh seluruh dinas di Kota Balikpapan seiring berjalannya waktu. Fakta menarik yang ditemukan di lapangan, prestasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) akhirnya diterima oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2013, dimana hal tersebut dicapai setelah diterapkannya aplikasi SIPKD pada tahun 2010-2012.

Ini merupakan pencapaian yang signifikan, setelah lima kali berturut-turut kota Balikpapan hanya mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atas penyusunan laporan keuangannya sejak tahun 2008. Bahkan hingga saat ini Kota Balikpapan dapat mempertahankan opini WTP tersebut. Kota Balikpapan menerima penghargaan dari pemerintah pusat pada 22 Oktober 2019, sebagai bentuk apresiasi karena telah mempertahankan kualitas informasi laporan keuangannya sebanyak lima tahun berturut-turut. Tentunya, perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan laporan yang terkomputerisasi, dapat memberikan efisiensi dalam waktu pengerjaan dan meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan oleh pegawai. Pengambilan keputusan dalam pemerintahan juga lebih efektif dengan data yang akurat dari laporan keuangan yang dihasilkan, terlebih apabila laporan keuangan tersedia tepat waktu, lengkap, dan minim kesalahan. Maka tidak heran jika SIPKD yang merupakan hasil perkembangan teknologi adalah salah satu faktor terpenting dalam penentu kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel. 3 diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi LKPD Kota Balikpapan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,831 > 2,0117$) dan tingkat signifikansi $0.007 < 0.05$. Adapun indikator utama dalam variabel ini yaitu pemahaman pegawai tentang akuntansi, pemahaman tugas dan tanggungjawab pekerjaan, serta pelatihan dan sosialisasi peraturan baru, sehingga hipotesis ketiga diterima. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Lamuda dan Syamsiah (2018).

Hasil penelitian ini juga di dukung dengan karakteristik responden yang sebagian besar di dominasi oleh lulusan S1 sebanyak 49%, kemudian disusul dengan lulusan SMA sebanyak 37%. Namun meski juga didominasi lulusan SMA, responden dalam penelitian ini di dominasi oleh pegawai dinas bagian keuangan yang telah bekerja dengan rentang waktu 11 hingga lebih dari 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai keuangan di dinas Kota Balikpapan telah berpengalaman akan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sistem pengendalian intern, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi LKPD Kota Balikpapan.

Meskipun penelitian ini telah di susun dan dirancang sedemikian rupa, tentunya tidak luput dari keterbatasan, diantaranya penelitian hanya mengambil sampel 18 dinas daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan karena keterbatasan waktu penelitian dan perizinan yang sedikit rumit dan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk pemerintah daerah secara umum karena penelitian ini hanya mengambil populasi di satu kota saja, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memperluas populasi dan sampel penelitian untuk meneliti di lebih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan bahkan di beberapa kabupaten/kota sehingga hasil yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan lebih representatif. Dan juga dapat melakukan penambahan variabel penelitian untuk menguji kualitas informasi LKPD Kota Balikpapan.

REFERENSI

- Aminah, A., Khairudin, K., & Indrayenti, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 22-33.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Efendi, L., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah). *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam)(Darussalam Journal of Economic Perspectives)*, 3(2), 182-195.
- Halim, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harlinda, H. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *Sorot*, 11(2), 127-144.
- Hartono, J. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi 6. Yogyakarta: BPF.
- Herman, L. A., & Daswir, D. (2017). Factors Analysis of Affecting The Quality Of Government Finance Subsidiaries (Empirical Study Payakumbuh Government). *Jurnal Pundi*, 1(2), 119-130.
- Lamuda, I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Gorontalo Management Research*, 1(2), 25-39.
- Laoli, V. (2018, December). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. In *Forum Ekonomi* (Vol. 20, No. 2, pp. 102-110).
- Murapi, I. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lombok Tengah). *InFestasi*, 12(2), 131-143.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah. <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/arsip/In/2007/pp41-2007.pdf>.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-56-tahun-2005-tentang-siste-m-informasi-keuangan-daerah/--232-267-PP56_2005.pdf.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <http://www.djpk.dep-keu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/-PP71.pdf>.
- Sari, G. I., & Fadli, F. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 7(3), 17-34.
- Sugiarto, A. (2014). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Doctoral Dissertation*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Surastiani, D. P., & Handayani, B. D. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 139-149.
- Tanjung, A. H. (2013). *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Bandung: Penerbit Alfabeta.